



2025



STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
UMPP

SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 660/KEP/I.0/D/2023

Jalan Raya Pekajangan No. 1A Kab. Pekalongan Telp. (0285) 7832294 website: www.umpp.ac.id email: admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025

Tentang :
PENETAPAN STANDAR MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan:

- Menimbang** : a. bahwa sebagai upaya pengendalian dan peningkatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sangat penting dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan diperlukan adanya standar mutu
- b. bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan adanya aturan dasar untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Mengingat** : 1. Aturan Dasar (AD) Muhammadiyah
2. Aturan Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah
3. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- Berdasarkan** : 1. Usulan Permohonan SK Manual Mutu Universitas UMPP No. 151/LPM-01/UMPP/XII/2025 tanggal 8 Desember 2025
2. Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian tanggal 9 Desember 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
- Pertama** : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Demikian Surat Keputusan ini disampaikan dapat digunakan dengan sebaik – baiknya.

Ditetapkan di : Pekajangan
Pada tanggal : 19 Jumadil Akhir 1447 H
10 Desember 2025 M

Ketua

Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan



Sekretaris

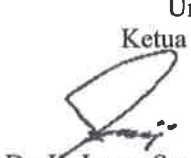
H. Abdul Shomad, SE

*Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah
Pekalongan Pekalongan
Nomor: 006/BPH/KEP/B/2025 tanggal 10 Desember 2025 M*

No	Standar	Nama Standar	Nomor Standar
1	Standar Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/001/R4
2		Standar Proses Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/002/R4
3		Standar Masukan Pendidikan	UMPP/BPH/STD/03/003/R4
4	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/004/R4
5		Standar Proses Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/005/R4
6		Standar Masukan Penelitian	UMPP/BPH/STD/03/006/R4
7	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/007/R4
8		Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/008/R4
9		Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
10	Standar Tambahan Perguruan Tinggi	Standar Jati diri	UMPP/BPH/STD/03/010/R4
11		Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah	UMPP/BPH/STD/03/011/R4
12		Standar Tata pamong, Tata kelola dan Penjaminan Mutu	UMPP/BPH/STD/03/012/R4
13		Standar Sumber Daya Manusia	UMPP/BPH/STD/03/013/R4
14		Standar Kerjasama	UMPP/BPH/STD/03/014/R4
15		Standar Kemahasiswaan dan Alumni	UMPP/BPH/STD/03/015/R4
16		Standar Keuangan	UMPP/BPH/STD/03/016/R4
17		Standar Sistem Informasi	UMPP/BPH/STD/03/017/R4
18		Standar Kesejahteraan	UMPP/BPH/STD/03/018/R4
19		Standar Sarana dan Prasarana	UMPP/BPH/STD/03/019/R4
20		Standar Humas dan Kesekretariatan	UMPP/BPH/STD/03/020/R4

Badan Pembina Harian (BPH)
Universitas Muhammadiyah Pekalongan Pekalongan

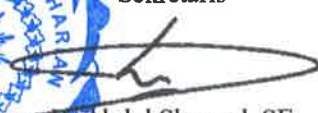
Ketua



Dr. H. Imam Suraji, M.Ag.



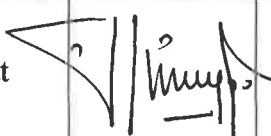
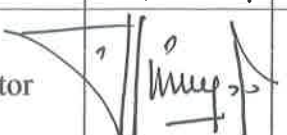
Sekretaris

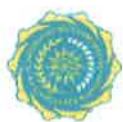


H. Abdul Shomad, SE

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN	Kode/No	UMPP/BPH/STD/03/009/R4
		Tanggal	9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
	STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	4

STANDAR MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Perumusan	Nuniek Nizmah Fajriyah, S.Kep.Ns., M.Kep, Sp. KMB	Kepala LPPM		25 November 2025/ 14 Jumadil Akhir 1447 H
2	Pemeriksaan	Bd. Nur Chabibah, S.Keb., MPH	Kepala LPM		4 Desemeber 2025/ 13 Jumadil Akhir 1447 H
3	Persetujuan	Dr. Imam Suradji, M.Ag	Ketua BPH		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
4	Pertimbangan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Senat		8 Desember 2025/ 17 Jumadil Akhir 1447 H
5	Penetapan	Dr. Nur Izzah., SKp., MKes	Rektor		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H
6	Pengendalian	Bdn. Wahyu Ersila, SST., MPH	Sekretaris LPM		9 Desember 2025/ 18 Jumadil Akhir 1447 H



CATATAN REVISI		
No.	Tanggal	Revisi/Perubahan
1	15 September 2020 (R1)	Penyesuain dengan SPMI UMPP dengan SPMI Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisiyah
2	30 September 2021 (R2)	Penambahan subtansial dengan delapan (8) Indikator kinerja utama (IKU) Kementrian Pendidikan tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia
3	14 Februari 2025 (R3)	1. Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 53 tahun 2023 2. Penyesuaian Intrumen akreditasi delapan (8) kriteria Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi dan Lembaga akreditasi Mandiri
4	9 Desember 2025 (R4)	1. Penyesuaian dengan Penyesuain dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025 2. Penyesuaian dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025



1. Daftar Istilah

- a. **Standar masukan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- b. **Standar masukan pengabdian kepada masyarakat** mencakup :
 - a) penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c) penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian
- c. **Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat** bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. **Pelaksana pengabdian kepada masyarakat** adalah civitas akademika dilingkungan UMPP yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM berupa penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. **Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat** ditentukan berdasarkan: (1.) Kualifikasi akademik; dan (2.) Hasil pengabdian kepada masyarakat.
- f. **Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat** harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa dengan tujuan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- g. **Sarana PkM** adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- h. **Prasarana PkM** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- i. **Sarana Prasarana PkM** sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Untuk memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan.
- j. **Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat** digunakan untuk membiayai: perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pelaporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rationale

Pelaksanaan PkM di UMPP mengacu pada visi dan misi UMPP, sehingga sesuai dengan tujuan UMPP. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka UMPP



memandang perlu untuk membuat suatu standar masukan sehingga luaran Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar masukan PkM menjadi tolak ukur didalam sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di UMPP mengacu pada Permendikbud, nomor 53, tahun 2023, Agenda riset nasional, visi dan misi UMPP, dan Renstra PkM UMPP. Menurut Permendikbud tersebut, “Standar masukan PkM merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi PkM untuk mencapai misi ke 4 dari UMPP”

3. Isi Standar

- i. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun Standar pembiayaan PkM yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) wajib menyediakan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal minimal 5 juta per dosen per tahun.
- iii. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun rumusan pendanaan selain dari internal perguruan tinggi, pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber daripemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, ataudana dari masyarakat.
- iv. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- v. Rektor UMPP dan Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyediakan dana pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- vi. Kepala LPPM UMPP mengalokasikan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- vii. Kepala LPPM UMPP mengalokasikan pendanaan insentif publikasi PkM setiap tahunnya.
- viii. Kepala LPPM UMPP menyedikan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- ix. Kepala LPPM UMPP beserta dengan Tim *Ad-Hoc* menyusun standar masukan PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- x. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa masukan PkM merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, dan mahasiswa.
- xi. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa PkM dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri.
- xii. Kepala LPPM UMPP menyusun strategi, kebijakan, dan prioritas PkM yang harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan LPPM UMPP dengan masukan dari pihak-pihak terkait seperti ketua program studi dan dosen.



- xiii. Kepala LPPM UMPP menjamin bahwa PkM dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Tim *Ad-Hoc* Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMPP.
- xiv. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa PkM dilaksanakan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat dan mitra UMPP.
- xv. Kepala LPPM UMPP menarahkan agar desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- xvi. Kepala LPPM UMPP menarahkan agar teknologi yang dikembangkan di PkM adalah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- xvii. Kepala LPPM UMPP menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai Rencana Strategis PkM UMPP paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.
- xviii. Kepala LPPM UMPP menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- xix. Kepala LPPM UMPP melakukan upaya peningkatan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- xx. Kepala LPPM UMPP menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- xxi. Kepala LPPM UMPP memastikan agar pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- xxii. Kepala LPPM UMPP memastikan agar pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
- xxiii. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) dan Kepala LPPM UMPP menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- xxiv. Kepala LPPM UMPP menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- xxv. Pelaksana PkM mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 minggu sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- xxvi. Kepala LPPM UMPP memastikan sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- xxvii. Kepala LPPM UMPP memastikan sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- xxviii. Kepala LPPM UMPP memastikan sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UMPP.
- xxix. Kepala LPPM UMPP memiliki akses mendapatkan informasi terkait pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya keberbagai pihak yang difasilitasi dengan jaringan teknologi informasi yang memadai
- xxx. Wakil Rektor II (Bidang Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) dan Kepala LPPM UMPP mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara



berkala minimal 2 kali setiap semester pada masing masing bagian.

- xxxi. Kepala LPPM UMPP memberikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi
- xxxii. Kepala LPPM UMPP memastikan bahwa sistem berbasis teknologi informasi yang diterapkan sudah andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor UMPP menyusun kebijakan terkait masukan Pengabdian Kepada Masyarakat di UMPP
- b. Kepala LPPM UMPP menyusun pedoman dan SOP terkait masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Kepala LPPM UMPP bersama Kepala LPM UMPP melakukan monitoring, evaluasi dan audit standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Kepala LPPM melakukan pembentukan Komite Etik PkM.
- e. Kepala LPPM UMPP beserta Wakil Rector Bidang II (Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun pedoman dan SOP terkait Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Kepala LPPM UMPP bersama Kepala LPM UMPP melakukan monitoring, evaluasi dan audit standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Kepala LPPM UMPP beserta Wakil Rector Bidang II (Keuangan, SDM, dan Sarana Prasarana) menyusun pedoman dan SOP terkait Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h. Kepala LPPM UMPP bersama Satuan Pengawas Internal melakukan monitoring, evaluasi dan audit standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. LPPM bersama dengan LPBK berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM
- j. Rektor UMPP dan Ka. Biro Administrasi umum melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.
- k. Biro Administrasi umum melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian kepadamasyarakat

5. Indikator Pencapaian

a. Indikator Kinerja Utama



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Memiliki kebijakan pelaksanaan PkM dan pelibatan mahasiswa dalam PkM dosen serta disosialisasikan	Terdapat pedoman penelitian yang menyatakan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM 100 PkM melibatkan mahasiswa yang telah memiliki kualifikasi sesuai dengan tema PkM	Risiko: Tidak semua penelitian melibatkan mahasiswa Akar Penyebab: - Sosialisasi pedoman penelitian belum optimal - Minat dan kesiapan mahasiswa untuk terlibat dalam PKM masih rendah - Prosedur penunjukan dan seleksi mahasiswa belum baku	- Rendahnya pengalaman riset mahasiswa dan kurangnya luaran publikasi bersama - Penilaian IKU penelitian turun.	Pedoman penelitian yang mewajibkan keterlibatan mahasiswa, Menetapkan monitoring keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen.	LPPM, LPM, Ka.Prodi, Dosen pelaksana	Pedoman PKM, Proposal PKM, yang melibatkan mahasiswa, Laporan PKM, monev pelaksanaan PKM
2	Setiap Dosen memiliki roadmap penelitian yang mendukung ketercapaian visi, misi, program studi dan fakultas	Terdapat monev yang menyatakan setiap Dosen memiliki roadmap yang mengacu pada visi dan misi dan 100% dilaksanakan setiap tahun	Risiko: Ketidaksihesuaian roadmap dengan kompetensi/visi misi PS/UPPS Akar Penyebab: - Dosen belum memahami keterkaitan roadmap dengan VMTS/RIP - Roadmap dibuat hanya untuk memenuhi administrasi - Perubahan bidang minat atau	- Penelitian tidak terarah dan tidak mendukung renstra PS/UPPS - Roadmap tidak berdampak pada output riset (publikasi, hibah) - Indikator kinerja penelitian menurun - Kualitas penelitian menurun	Workshop penyusunan roadmap, review roadmap oleh reviewer, monev roadmap dosen secara rutin	LPPM, LPM, Dekan/Wadek I, Ka.Prodi, Dosen peneliti	Laporan workshop penyusunan roadmap, hasil review roadmap, SOP monev, laporan Monev roadmap



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			ketidaksesuaian latar belakang				
3	Persentase jumlah PkM yang sesuai dengan rencana strategis PkM.	100%	Risiko: Persentase PKM sesuai dengan renstra penelitian tidak tercapai Akar Penyebab: - Pelaksana PKM tidak memahami renstra penelitian - Monev keselarasan renstra tidak berjalan - Kerjasama mitra eksternal tidak diarahkan pada prioritas renstra	- Ketidaksinkronan tema PKM dosen dengan arah pengembangan institus - PKM kolaboratif tidak mendukung capaian Renstra	- Sosialisasi rutin renstra setiap awal tahun akademik, - Menambahkan indikator kesesuaian Renstra pada penilaian proposal. - Monev kesesuaian roadmap	LPPM, LPM, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen pelaksana	Laporan workshop penyusunan roadmap, hasil review roadmap, SOP monev, laporan Monev roadmap
4	Terdapat kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM.	Terdapat Kebijakan dan pedoman pengelolaan PkM terdokumentasi dan di sosialisasikan secara berkala	Risiko: Kebijakan dan pedoman tidak tersusun dengan lengkap dan tidak tersosialisasikan Akar Penyebab: - Administrasi dokumen belum terstandar/tidak mutakhir - Sosialisasi tidak efektif	- Dosen tidak memahami mekanisme PKM - Pelaksanaan PKM antar dosen/PS tidak seragam - Kualitas proposal PKM rendah	- Penetapan standar penyusunan pedoman PKM - Menyusun kalender sosialisasi - Monev pedoman PKM	LPPM, LPM, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen pelaksana	SK Tim penyusun pedoman, pedoman pelaksanaan PKM, laporan sosialisasi, laporan monev pelaksanaan PKM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
5	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Diperoleh data persentase sebesar $\geq 85\%$ PkM yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Risiko: PKM yang menerapkan IPTEK tidak mencapai target Akar Penyebab: - Dosen membuat PkM yang bersifat sosialisasi tanpa teknologi/metode ilmiah - Tidak ada pemetaan kebutuhan mitra - Dosen tidak menguasai metode IPTEK yang relevan - Dana terbatas sehingga dosen memilih PkM sederhana	Persentase PkM IPTEK turun, Kualitas PkM menurun: tidak inovatif, Tidak dapat mensimulasikan atau mengimplementasi IPTEK	Workshop penyusunan proposal PkM berbasis IPTEK, Pemetaan kebutuhan mitra tiap tahun, Membuat MoU/PKS dengan mitra strategis berbasis teknologi, Insentif bagi dosen yang menerapkan IPTEK, monev/audit PKM berbasis IPTEK	LPPM, LPM, Warek 2, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen pelaksana	Laporan workshop, Pedoman PkM berbasis IPTEK, MoU/PKS, RAB PKM, laporan monev
6	Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.	Diperoleh data persentase sebesar $\geq 68\%$ PkM yang memberdayakan masyarakat.	Risiko: Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat tidak mencapai target Akar Penyebab: - Dosen kurang memahami konsep PkM berbasis pemberdayaan.	- Penurunan nilai SPMI dan akreditasi (BAN-PT/LAM). - Reputasi perguruan tinggi menurun dalam hal kontribusi sosial. - Hilangnya peluang kerjasama dengan pemerintah/NGO/mitra industri.	- Melaksanakan <i>need assessment</i> sebelum PkM. - Menyusun pedoman PkM pemberdayaan masyarakat berbasis capaian IKU. - Mewajibkan dosen menyusun rencana kerja PkM berbasis masalah lokal.	LPPM, LPM, Warek 2, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen pelaksana	Pedoman/ SOP PKM berbasis pemberdayaan masy, proposal dan lap PKM dosen, laporan monev PKM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Proposal PkM tidak mengikuti standar atau pedoman pemberdayaan - Anggaran tidak memadai untuk kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan. - Rendahnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal.	- Publikasi dan luaran PkM berkurang. - Kepercayaan masyarakat kepada perguruan tinggi menurun.	- Monitoring dan evaluasi PkM secara berkala oleh LPPM/SPMI.		
7	Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per-tahun.	Memenuhi jumlah ketaatan terhadap etika PkM 100% per tahun.	Risiko: Pelaksanaan PkM tidak sesuai protokol etik yang telah disetujui Akar Penyebab: - Dosen beranggapan PkM non-eksperimental tidak membutuhkan kaji etik. - Tidak ada checklist kepatuhan etik saat pelaksanaan. SOP etik tidak diperbarui.	- Penurunan persentase kepatuhan etik PkM sehingga target 100% tidak tercapai - Risiko pelanggaran etik yang dapat merugikan masyarakat sasaran PkM. - Reputasi perguruan tinggi menurun akibat isu ketidakpatuhan etik. - PkM berpotensi dibatalkan atau tidak dapat	Program sosialisasi dan workshop etik PkM, Penguatan SOP etik, Penyediaan template dokumen etik standar, Audit etik internal	LPPM, LPM, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen pelaksana	SK komite etik PKM, Laporan sosialisasi, SOP etik, laporan monev dan audit etik, laporan pelaksanaan PKM sesuai protocol etik



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
				dipublikasikan di jurnal bereputasi.			
8	Keberadaan kelompok riset UMPP.	UMPP memiliki kelompok riset yang memenuhi satu dari empat aspek berikut ini: - adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, - keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta - dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.	Risiko: - Kelompok riset terbentuk tetapi tidak aktif - Minim kolaborasi nasional maupun internasional - Produk riset belum memiliki nilai inovasi atau kebermanfaatan Akar Penyebab: - Kebijakan/formalitas kelembagaan belum jelas - Kurangnya kapasitas SDM dalam riset kolaboratif - Minimnya pendanaan riset & dukungan PT - Tidak adanya roadmap riset kelompok - Keterbatasan akses jejaring nasional-internasional	- Kinerja riset institusi rendah pada penilaian akreditasi & IKU. - Rendahnya jumlah produk riset yang bermanfaat bagi masyarakat. - Gagal mencapai daya saing internasional. - Turunnya reputasi akademik UMPP.	SK pembentukan kelompok riset, menyusun roadmap riset kelompok, pelatihan peningkatan kapasitas riset, penyediaan dana internal kompetitif untuk kelompok riset, monev rutin	LPPM, LPM, LPBK, Warek 2, Ka.Prodi, Dekan/Wadek I, Dosen peneliti	SK kelompok riset, roadmap riset kelompok, laporan pelatihan peningkatan kapasitas, SK pendanaan riset, MoU/MoA
9	Keberadaan Laboratorium riset UMPP	UMPP memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal	Risiko: - Fasilitas laboratorium belum memadai - Pemanfaatan laboratorium rendah	Penurunan kualitas dan produktivitas riset	- SK pendirian laboratorium - Penyusunan rencana kebutuhan alat (RKA)	LPPM, Warek 2, Ka.Prodi, Dekan/Wadek II, Dosen peneliti	SK pendirian lab, SOP pengadaan alat, SOP pemeliharaan alat,



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		keberadaan laboratorium riset.	Akar Penyebab: - Keterbatasan anggaran - Tidak ada pemeliharaan rutin - Dosen/mahasiswa tidak memanfaatkan lab Riset belum berjalan optimal		- Program pemeliharaan alat & kalibrasi - Program riset mahasiswa dan dosen berbasis lab Pelatihan K3		laporan pelatihan, rencana anggaran
10	Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	Rasio penggunaan sarana/ prasarana PkM internal $\geq 70\%$.	Risiko: Rasio penggunaan sarpras penelitian $< 70\%$ Akar Penyebab: - Rendahnya tingkat pemanfaatan lab oleh dosen/mahasiswa - Kapasitas sarana terbatas - Kurang kompetensi SDM laboran	Penelitian internal menjadi terhambat/ kualitas menurun	- Sosialisasi pemanfaatna lab - Membuat sistem informasi penggunaan lab - Pelatihan laboran	LPPM, Warek 2, Kabag Lab, Kaprodi, Dosen pelaksana	SOP peminjaman & penggunaan sarpras penelitian, logbook, sistem informasi, bukti pelatihan SDM laboran
11	Ketersediaan buku (e-book atau hard copy).	≥ 400 judul buku/prodi.	Risiko: Target jumlah buku tidak tercapai Akar Penyebab: - keterbatasan anggaran pengadaan - kurangnya partisipasi dosen dalam	Tidak terpenuhi IKU berdampak pada akreditasi dan mutu pembelajaran, koleksi tidak sesuai kebutuhan pembelajaran	- menambah anggaran pengadaan buku - optimalisasi e book open access - pengajuan hibah buku	LPPM, Warek 2, Biro Perpustakaan, Kaprodi, Dosen	RAB perpustakaan, form kebutuhan buku, SOP pengadaan buku, proposal hibah buku, panduan akses e book



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			merekomendasikan judul buku - tidak ada monev ketersediaan buku				
12	Ketersediaan prosiding.	>9 prosiding /prodi.	Risiko: Jumlah prosiding yang dihasilkan prodi tidak mencapai target (>9 prosiding) Akar Penyebab: - Rendahnya partisipasi dosen/mahasiswa dalam seminar ilmiah - Keterbatasan dana untuk publikasi prosiding - Minimnya informasi mengenai call for papers dari seminar nasional/internasional - Belum ada sistem monitoring target publikasi per dosen	- Target kinerja penelitian prodi tidak tercapai - Penurunan rekognisi akademik prodi dan fakultas - Berkurangnya bukti capaian luaran penelitian untuk akreditasi - Tidak terpenuhinya IKU terkait publikasi ilmiah	- Menyusun kalender wajib publikasi prosiding dosen setiap tahun - Memberikan insentif atau subsidi biaya publikasi prosiding - Menyebarluaskan informasi call for papers melalui grup resmi fakultas/prodi - Melakukan monitoring semesteran capaian publikasi dosen - Mendorong kolaborasi penelitian/publikasi lintas prodi atau dengan mahasiswa	- Ketua Prodi - Gugus Mutu Fakultas - LPPM UMPP	- Daftar prosiding yang dipublikasikan prodi - Bukti publikasi (link, ISBN/ISSN, sertifikat pemakalah) - Rekap target dan capaian publikasi dosen - Notulen rapat monitoring publikasi - Bukti pengiriman artikel ke seminar/prosiding
13	Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk e-journal).	Memiliki ≥3 jurnal nasional terakreditasi per-prodi & nomernya lengkap.	Risiko: Prodi tidak memiliki jumlah jurnal terakreditasi nasional sesuai target (kurang dari 3)	- Target IKU terkait luaran publikasi tidak tercapai - Pengakuan akademik prodi menurun	- Membentuk dan melatih tim pengelola jurnal (editorial board) - Menyusun roadmap akreditasi	Pengelola Jurnal, Ketua Prodi - LPPM UMPP	SK Pengelola jurnal - Bukti akreditasi SINTA (sertifikat SINTA) - URL OJS jurnal



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: - Proses akreditasi jurnal belum dipersiapkan dengan baik - Keterbatasan pengelola jurnal yang kompeten - Tidak terpenuhinya standar SINTA pada pengelolaan jurnal (OJS, tata kelola, frekuensi terbit) - Minimnya artikel yang masuk (submission) sehingga edisi tidak terbit tepat waktu - Keterbatasan dana untuk pengelolaan dan akreditasi jurnal	- Berkurangnya peluang kolaborasi penelitian eksternal - Kinerja LPPM dan prodi terhambat pada aspek publikasi ilmiah	- jurnal dan standar pengelolaan OJS - Menyediakan dukungan pendanaan untuk pengelolaan jurnal dan akreditasi SINTA - Melakukan <i>call for papers</i> secara berkala dan bekerja sama dengan dosen/peneliti eksternal - Monitoring ketepatan terbit jurnal setiap periode		- Edisi terbit jurnal lengkap (PDF/online) - Roadmap pengembangan jurnal - Notulen rapat pengelolaan jurnal - Laporan monitoring ketepatan terbit
14	Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk e-journal).	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per-prodi.	Risiko: Prodi tidak memiliki atau tidak memperbarui langganan jurnal internasional sesuai target Akar Penyebab: - Keterbatasan anggaran untuk	- Ketersediaan referensi internasional berkualitas menjadi terbatas - Penurunan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa - Hambatan bagi dosen dalam menghasilkan	- Menyusun perencanaan kebutuhan jurnal internasional setiap awal tahun akademik - Mengalokasikan anggaran khusus untuk langganan jurnal internasional - Memperkuat kerja sama dengan	- Perpustakaan Universitas - LPPM UMPP	- Bukti langganan jurnal (invoice/kontrak) - Daftar jurnal internasional yang dilanggan per prodi - Notulen rapat perencanaan kebutuhan jurnal



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			berlangganan jurnal internasional - Minimnya koordinasi antara prodi, fakultas, dan perpustakaan - Kurangnya pemanfaatan jurnal internasional sehingga dianggap tidak prioritas - Tidak adanya perencanaan kebutuhan jurnal secara tahunan	publikasi bereputasi - Tidak terpenuhinya target IKU pada aspek internasionalisasi akademik	perpustakaan atau lembaga penyedia akses jurnal - Melakukan sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan jurnal internasional kepada dosen/mahasiswa		- Laporan penggunaan jurnal oleh dosen/mahasiswa
15	Besar dana pengabdian per dosen per tahun.	Besar dana pengabdian per dosen per tahun 5juta	Risiko: Dana pengabdian yang diterima atau digunakan per dosen tidak mencapai target 5 juta per tahun Akar Penyebab: - Minimnya proposal PkM yang diajukan dosen - Proposal tidak lolos seleksi pendanaan internal/eksternal - Keterbatasan anggaran fakultas/universitas	- Capaian kinerja PkM dosen rendah - Pengabdian masyarakat tidak optimal dan tidak berkelanjutan - Tidak terpenuhinya indikator kinerja PkM fakultas dan universitas	- Melakukan pelatihan penyusunan proposal PkM bagi dosen - Menyediakan pendampingan/mentoring proposal sebelum diajukan - Mengalokasikan dana internal fakultas/universitas untuk mendukung PkM - Mendorong dosen mengikuti hibah PkM eksternal secara rutin	LPPM UMPP, WR II	- Laporan realisasi dana PkM per dosen - Bukti pendanaan hibah internal/eksternal - Proposal PkM yang diajukan dan lolos - Rekap anggaran PkM tahunan



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			untuk pendanaan PkM - Dosen kurang aktif mengikuti hibah pengabdian eksternal (Kemendikbud, BRIN, Pemda, CSR)				
16	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap.	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap yang dibiayai luar negeri sebesar > 5 %.	Risiko: Persentase dosen yang memperoleh pendanaan PkM luar negeri tidak mencapai target (>5%) Akar Penyebab: - Minimnya informasi peluang pendanaan PkM luar negeri - Dosen kurang memiliki jejaring internasional untuk kolaborasi PkM - Proposal tidak memenuhi standar internasional atau tidak kompetitif - Tidak ada pendampingan atau mentoring untuk hibah internasional	- Persentase capaian PkM internasional sangat rendah - Rekognisi internasional prodi dan institusi menurun - IKU internasionalisasi tidak tercapai	- Menyusun program pelatihan penulisan proposal internasional - Menjalin kerja sama dengan universitas internasional terkait PkM - Membentuk tim pendamping proposal hibah internasional di LPPM - Mengirimkan informasi peluang hibah internasional secara rutin kepada dosen	- LPPM UMPP - Dosen Pengusul PkM	- Daftar dosen penerima PkM pendanaan luar negeri - Bukti proposal hibah internasional yang diajukan - Surat kerja sama internasional (MoU/MoA) - Laporan monitoring PkM internasional



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
17	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap yang dibiayai dalam negeri (luar PT)	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap yang dibiayai dalam negeri (luar PT) sebesar > 50 %.	Risiko: Persentase dosen yang memperoleh pendanaan PkM dari lembaga dalam negeri (luar PT) tidak mencapai >50% Akar Penyebab: - Dosen kurang aktif mengajukan proposal ke sumber pendanaan luar PT (Kemendikbud, Pemda) - Kurangnya informasi peluang hibah PkM dalam negeri	- Capaian target pendanaan PkM nasional tidak terpenuhi - Jumlah kegiatan PkM eksternal berkurang sehingga rekognisi institusi melemah - Hilangnya peluang pendanaan yang berdampak pada kualitas dan keberlanjutan PkM	- Menyediakan pelatihan penyusunan proposal PkM untuk hibah nasional - Membuat kalender hibah PkM dalam negeri agar dosen dapat mempersiapkan proposal lebih awal - Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang mendapatkan hibah PkM luar PT	- LPPM UMPP - Ketua Prodi - Dosen pengusul PkM	- Daftar dosen penerima hibah PkM nasional - Proposal hibah yang diajukan dan diterima - Surat keputusan pendanaan/kontak hibah
18	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap yang dibiayai PT/mandiri	Persentase PkM terhadap jumlah dosen tetap yang dibiayai PT/mandiri sebesar >50 %.	Risiko: - Rendahnya tingkat partisipasi dosen dalam melakukan PkM secara mandiri Akar Penyebab: - Beban kerja dosen tinggi sehingga tidak dapat melaksanakan PkM. - Minimnya insentif atau dukungan dari perguruan tinggi.	- Target IKU terkait PkM tidak tercapai. - Kualitas dan kuantitas pengabdian masyarakat menurun. Reputasi institusi dalam pengabdian masyarakat berkurang. Kesempatan mendapatkan pendanaan	- Memberikan insentif dan dukungan bagi dosen yang melaksanakan PkM. - Menyusun jadwal PkM yang realistis sesuai beban kerja dosen. Sosialisasi rutin mengenai pentingnya PkM dan target IKU. - Monitoring partisipasi dosen	Wakil Dekan I, LPPM, Kepala Prodi, Dosen sebagai pelaksana PkM	Daftar dosen pelaksana PkM - Laporan kegiatan PkM -Bukti anggaran yang digunakan - Notulen rapat monitoring PkM - Laporan evaluasi persentase ketercapaian PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Kurangnya sosialisasi dan motivasi bagi dosen untuk terlibat PkM. - Tidak adanya monitoring berkala atas partisipasi dosen. - Keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan PkM.	eksternal berkurang.	secara berkala. Mengalokasikan anggaran cukup untuk mendukung kegiatan PkM dosen.		
19	Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun.	Dana pemberdayaan masyarakat per tahun sebesar > 1% dari total pendapatan.	Risiko: Persentase dana pemberdayaan masyarakat tidak mencapai >1% dari total pendapatan. Akar Penyebab: - Perencanaan anggaran pemberdayaan masyarakat belum matang. - Ketersediaan dana operasional lebih diprioritaskan untuk kegiatan lain. - Kurangnya koordinasi antara unit keuangan dan unit pelaksana PkM.	- Tidak tercapainya IKU fakultas/ universitas - Reputasi institusi menurun dalam aspek pemberdayaan masyarakat - Menurunnya peluang kerja sama pendanaan eksternal. - Audit internal menemukan ketidaksesuaian realisasi anggaran dengan target.	- Menyusun perencanaan anggaran tahunan yang mengalokasikan minimal 1% sejak awal tahun. - Membuat SOP prioritas anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. - Memperkuat koordinasi antara unit PkM, unit keuangan, dan pimpinan fakultas. - Menyusun timeline pelaksanaan program PkM agar	- Wakil Dekan II (Bidang Keuangan dan Aset) - Ketua LPPM/Unit PkM - Koordinator Keuangan Fakultas	- Dokumen realisasi anggaran PkM - Laporan monitoring dan evaluasi anggaran - SOP penganggaran PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Program pemberdayaan tidak siap secara konsep sehingga penganggaran terhambat.		penganggaran tidak terlambat.		
20	Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun.	Dana pemberdayaan masyarakat per tahun sebesar > 1% dari total pendapatan.	Risiko: Persentase dana bantuan sosial dan bencana tidak mencapai >1% dari total pendapatan. Akar Penyebab: - Prioritas anggaran lebih banyak diarahkan ke operasional rutin. - Tidak adanya perencanaan khusus untuk bantuan sosial dan bencana. - Minimnya data kebutuhan dan program yang relevan.	- Target IKU tidak tercapai. - Institusi dinilai kurang responsif terhadap isu sosial dan bencana. - Menurunnya citra dan reputasi institusi di masyarakat. - Temuan audit terkait ketidaksesuaian realisasi anggaran.	- Membuat roadmap program bantuan sosial dan kebencanaan yang jelas. - Memperkuat koordinasi dengan unit terkait (keuangan, PkM, LPPM). - Menyusun SOP penyaluran bantuan yang cepat dan transparan.	- WR II - LPPM	- Laporan realisasi anggaran tahunan - Laporan kegiatan bantuan sosial/bencana - SOP penyaluran bantuan
21	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar >10 %.	Risiko: Realisasi penggunaan dana PkM tidak mencapai >10% dari total dana perguruan tinggi. Akar Penyebab:	- IKU universitas/fakultas tidak tercapai. - Meningkatnya temuan audit terkait rendahnya realisasi serapan	- Penyusunan roadmap PkM untuk memastikan kesinambungan kegiatan dan penggunaan anggaran. - Memberikan	LPPM, Wadek I & II	- Laporan realisasi anggaran PkM - SOP pencairan dana PkM - Laporan monitoring dan evaluasi PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Perencanaan program PkM belum optimal sehingga banyak kegiatan tidak siap dieksekusi.	dana PkM.	insentif bagi dosen yang melaksanakan PkM berskala besar atau kolaboratif.		
22	Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri):	Dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri) sebesar < 20 s.d > 15%	Risiko: Perolehan dana pengabdian eksternal tidak mencapai target 15–20%. Akar Penyebab: - Proposal PkM tidak memenuhi standar lembaga pemberi dana. - Informasi call for proposal tidak terpantau dengan baik. - Keterbatasan waktu dosen untuk menyusun proposal berkualitas.	- Tidak tercapainya indikator kinerja PkM terkait dana eksternal. - Berkurangnya peluang kolaborasi berkelanjutan dengan lembaga eksternal. - Citra institusi sebagai kampus berbasis kolaborasi menurun. - Beban pendanaan PkM hanya mengandalkan dana internal.	- Pelatihan intensif penyusunan proposal PkM untuk skema pendanaan eksternal. - Memperluas jejaring kerja sama melalui MoU/MoA dengan lembaga donor nasional/ internasional. - Menyediakan reviewer internal untuk pendampingan proposal sebelum diajukan.	LPPM, Wadek I LPBK	- Proposal PkM yang diajukan ke lembaga eksternal - MoU/MoA dengan lembaga mitra - Laporan realisasi dana eksternal
23	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/ instruktur.	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/ instruktur.	Risiko: Mekanisme dan pedoman penggunaan dana tidak tersusun atau tidak digunakan secara konsisten oleh dosen/instruktur. Akar Penyebab: - Belum adanya tim khusus yang bertugas	- Penggunaan dana tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan temuan audit. - Potensi ketidakteraturan dan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan kegiatan	- Menyusun pedoman resmi penggunaan dana internal dan eksternal secara rinci dan mudah dipahami. - Membuat SOP alur pengajuan, pencairan, dan pelaporan dana.	Wadek II, LPPM	- Pedoman dan SOP penggunaan dana - Laporan penggunaan dana dari dosen



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			menyusun pedoman secara formal. - Pedoman lama tidak diperbarui sehingga tidak relevan.	PkM/penelitian. - Citra lembaga terkait tata kelola keuangan menjadi buruk.			
24	Adanya monev penggunaan dana.	Ada monev penggunaan Dana. Terdapat bukti legal aspek dari keuangan	Risiko: Kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan dana tidak terlaksana atau tidak terdokumentasi dengan baik. Akar Penyebab: - Tidak adanya jadwal monev yang baku setiap semester - Pedoman dan instrumen monev belum disusun secara jelas. - Pelaksana kegiatan tidak menyerahkan laporan tepat waktu	- Potensi penyimpangan penggunaan dana meningkat. - Keterlambatan laporan pertanggungjawaban dana kegiatan PkM	- Menyusun pedoman dan instrumen monev penggunaan dana yang terstandarisasi. - Membentuk tim monev khusus dari LPPM dan unit keuangan.	- Wadek II, LPPM, Warek II	- Laporan monev penggunaan dana
25	Adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur.	Ada laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur.	Risiko: Laporan pertanggungjawaban (LPJ) pendanaan PkM tidak dibuat, tidak lengkap, atau terlambat diserahkan. Akar Penyebab:	- Dana PkM tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah. - Risiko temuan audit yang dapat merugikan institusi. - Pencairan dana tahap berikutnya	- Melakukan sosialisasi prosedur LPJ kepada seluruh dosen/instruktur penerima dana PkM. - Mengimplementasikan sistem LPJ digital	LPPM, Dosen/instruktur penerima dana PkM - Wadek II	- Laporan Pertanggungjawaban PkM (LPJ) - Bukti transaksi: nota, kuitansi, invoice



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Dosen/instruktur kurang memahami format dan prosedur LPJ yang benar. - Beban kerja dosen tinggi sehingga laporan tertunda. - Bukti keuangan (nota, kuitansi, invoice) tidak dikumpulkan selama kegiatan.	tertunda atau ditolak.			
26	Adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Ada diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.	Risiko: Kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat tidak dilakukan atau tidak terdokumentasi. Akar Penyebab: - Dosen/instruktur tidak memahami kewajiban diseminasi setelah kegiatan PkM. - Tidak tersedianya panduan atau format diseminasi yang jelas. - Kurangnya forum atau wadah resmi untuk mempresentasikan hasil PkM. - Minimnya dukungan	- Tidak terpenuhinya IKU terkait diseminasi PkM. - Peluang kolaborasi dan pendanaan eksternal menjadi berkurang. - Reputasi institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat menurun.	- Menyelenggarakan seminar internal/eksternal rutin untuk presentasi hasil PkM. - Mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan diseminasi.	LPPM, Wadek I, Dosen/instruktur pelaksana PkM - Humas/Unit Publikasi	- berita acara seminar hasil PkM - Bukti publikasi pada website/repositori - Laporan akhir kegiatan PkM yang memuat bagian diseminasi



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			anggaran untuk kegiatan diseminasi.				
27	Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat.	Ada mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat.	Risiko: Pedoman penggunaan dana PkM tidak disusun atau tidak diperbarui secara berkala. Akar Penyebab: - Koordinasi lemah antara LPPM dan unit keuangan. - Pemahaman dosen terhadap standar pengelolaan dana masih rendah.	- Dana digunakan tidak sesuai aturan. - Muncul temuan audit. - Akuntabilitas dan transparansi menurun.	- Membentuk tim penyusun pedoman dana PkM. - Menetapkan SOP penggunaan dana. - Sosialisasi rutin pedoman kepada dosen. - Review pedoman setiap tahun.	LPPM, Wadek II	Pedoman penggunaan dana PkM, SOP,
28	Terdapat sistem informasi yang efektif dalam pelaksanaan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyebarluaskan proses dan hasil PkM	Sistem informasi efektif dalam pelaksanaan 5 tahapan PkM	Risiko: Sistem informasi PkM tidak berjalan efektif atau tidak digunakan secara maksimal. Akar Penyebab: - Sistem belum user-friendly atau sulit diakses. - Minimnya sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem kepada dosen/instruktur. - Data PkM tidak	- Proses perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan, dan diseminasi PkM tidak optimal. - Data PkM tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. - Keterlambatan informasi dan keputusan terkait PkM.	- Meningkatkan kualitas sistem informasi - Melakukan pelatihan rutin penggunaan sistem bagi dosen/ instruktur. - Menetapkan SOP pengelolaan data di sistem PkM.	LPPM, Tim IT Fakultas/Universitas, Wadek I, Dosen/ instruktur sebagai pengguna sistem	- SOP pengelolaan data PkM - Laporan monitoring dan evaluasi penggunaan sistem - Dokumen integrasi data dan laporan PkM



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			terintegrasi dengan baik sehingga informasi tidak akurat.				
29	Ketersediaan akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana penelitian	Tersedianya akses yang memadai bagi dosen/ instruktur dalam pelaksanaan penelitian.	Risiko: Akses terhadap sarana dan prasarana penelitian tidak memadai atau terbatas. Akar Penyebab: - Jumlah sarana/prasarana penelitian terbatas. - Pengelolaan dan penjadwalan fasilitas kurang optimal. - Kurangnya anggaran perawatan dan pengadaan alat baru. - Tidak adanya sistem peminjaman atau reservasi fasilitas yang terstruktur.	- Penelitian dosen/ instruktur tertunda atau tidak optimal. - Penurunan kualitas dan kuantitas output penelitian. - Reputasi fakultas/ universitas dalam penelitian menurun. - Kesempatan mendapatkan dana penelitian eksternal berkurang.	- Menetapkan SOP peminjaman dan penggunaan fasilitas penelitian. - Mengalokasikan anggaran rutin untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. - Monitoring pemanfaatan fasilitas secara berkala.	Wadek I, LPPM, Bagian Sarana & Prasarana Fakultas/Unive rsitas, Dosen/ instruktur pengguna fasilitas	- Daftar sarana/prasarana penelitian - Laporan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas - SOP peminjaman fasilitas - Laporan monitoring pemanfaatan fasilitas
30	Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi	Dosen menerima penugasan PkM dan mengikuti program peningkatan kompetensi sesuai bobot tugas yang ditetapkan.	Risiko: Dosen menerima penugasan PkM dan mengikuti program peningkatan kompetensi sesuai bobot tugas yang ditetapkan.	- Kompetensi dosen dalam PkM tidak meningkat. - Penugasan PkM tidak sesuai standar dan bobot yang ditetapkan. - Rendahnya kualitas pengabdian	- Menyediakan program pelatihan dan peningkatan kompetensi PkM secara rutin. - Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan	Wadek I, LPPM, Kepala Prodi, Dosen pelaksana PkM	- Surat penugasan PkM - Daftar peserta pelatihan/peningkatan kompetensi - Laporan evaluasi penugasan PkM - Dokumen



No	Indikator Kinerja Utama	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Penyebab: - Kurangnya sistem penugasan yang jelas dan terdokumentasi. - Minimnya program pelatihan atau peningkatan kompetensi untuk PkM.	kepada masyarakat. - Capaian IKU terkait PkM menurun.	penugasan. - Sosialisasi program peningkatan kompetensi secara rutin kepada dosen.		sertifikasi atau bukti pelatihan
31	Menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya sistem TI yang andal dan digunakan secara efektif dalam seluruh tahapan PkM.	Risiko: Sistem TI tidak berjalan andal, tidak digunakan secara optimal, atau terjadi gangguan teknis. Akar Penyebab: - Sistem TI belum user-friendly dan tidak terintegrasi penuh. - Minimnya pelatihan bagi dosen/instruktur dalam penggunaan sistem.	- Dokumentasi, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi PkM tidak optimal. - Data dan laporan PkM tidak akurat atau terlambat.	- Meningkatkan kualitas sistem TI (user-friendly, integrasi penuh, andal). - Menyelenggarakan pelatihan rutin penggunaan sistem untuk dosen/instruktur. - Monitoring penggunaan sistem secara berkala dan evaluasi kinerja sistem.	LPPM, tim IT Fakultas/Universitas, Wadek I,	- Laporan evaluasi kinerja sistem TI - SOP dan panduan penggunaan sistem - Dokumen hasil pelaporan dan diseminasi melalui sistem TI

No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
1	Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM.	Ditemukan 80%-99% kesesuaian isi PkM	Risiko: Akar Penyebab: Risiko:	- Rendahnya capaian IKU PkM. - Reputasi institusi menurun karena	- Penguatan pelatihan perencanaan PkM	LPPM, LPM, Dekan/Wadek, Kaprodi, Dosen pelaksana	Pedoman PkM Terapan, Laporan akhir PkM, Form



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
		terapan berorientasi pada hasil PkM.	Target Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM tidak tercapai Akar Permasalahan: - PkM tidak berbasis kebutuhan masyarakat (need assessment lemah). - Luaran PkM tidak sesuai rencana awal (misalignment output). - Monitoring PkM lemah atau tidak berkelanjutan.	program tidak berdampak nyata. - Hasil PkM tidak dapat dimanfaatkan oleh mitra. - Risiko pengembalian dana hibah jika tidak sesuai proposal.	berbasis bukti (need assessment). - Mewajibkan review proposal PkM oleh unit mutu atau reviewer eksternal. - Melakukan monitoring & evaluasi PkM pada awal-tengah-akhir kegiatan. - Menetapkan standar kesesuaian isi dan output PkM. - Penyusunan pedoman PkM terapan yang lebih jelas dan mudah dipahami dosen. - Evaluasi luaran PkM bersama mitra (user feedback).		Monitoring dan Evaluasi PkM



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
2	Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat 16%-19% isi PkM LPPM UMPP dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Risiko: Persentase PkM lintas ilmu < 16% sehingga target IKU tidak tercapai. Akar Permasalahan: - Rendahnya kolaborasi antar program studi dan fakultas. - Dosen tidak memiliki kompetensi atau pengalaman dalam PkM interdisipliner. - Minimnya skema atau pendanaan internal yang mendorong PkM lintas disiplin. - Lemahnya jejaring eksternal yang mendukung PkM interdisipliner.	- Kualitas PkM monoton dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks. - Berkurangnya peluang pendanaan eksternal karena proposal kurang inovatif. - Menurunnya reputasi LPPM dan Perguruan Tinggi dalam bidang hilirisasi ilmu dan kolaborasi multidisiplin.	Kebijakan & Insentif, Workshop penyusunan proposal PkM lintas ilmu., Pemetaan Potensi Kolaborasi, Penguatan Jejaring Kerja Sama	LPPM, Warek 2, LPM, LPBK, Dekan/Wadek, Kaprodi, Dosen pelaksana	Pedoman PKM multidisiplin, proposal dan PKM multidisiplin, MoU/MoA, laporan workshop, SK pendanaan PKM, laporan monev PKM
3	Isi/ tema PkM UMPP mengantisipasi permasalahan global.	10-19% isi/tema PkMUMPP mencakup permasalahan global.	Risiko: Rendahnya jumlah PkM yang mengangkat isu global (perubahan iklim, SDGs, kesehatan global, digitalisasi, ketahanan pangan, dsb.)	- Reputasi institusi sebagai perguruan tinggi berwawasan global melemah. - Dosen kurang kompetitif dalam hibah global. - Rendahnya kontribusi	- Penyusunan panduan PkM berbasis isu global & SDGs oleh LP2M. - Memasukkan kriteria “relevansi global” dalam seleksi internal proposal PkM.	LPPM, Warek 2, LPM, LPBK, Dekan/Wadek 1, Kaprodi, Dosen pelaksana	Renstra Renop UMPP, panduan PKM berbasis isu global, MoU/MoA, laporan monev PKM



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			Akar Permasalahan: - Dosen kurang memahami isu global & SDGs. - Dosen kurang kompetitif dalam hibah global. - Rendahnya kontribusi Perguruan Tinggi pada pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs). - Pengembangan keilmuan dosen kurang mengikuti tren internasional.	Perguruan Tinggi pada pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs). - Pengembangan keilmuan dosen kurang mengikuti tren internasional.	-Membangun MoU/MoA dengan lembaga internasional/NGO global - Monitoring & evaluasi rutin capaian persentase tema global setiap semester.		
4	Isi/tema PkM UMPP dilakukan <i>joint research</i> dengan Mitra LN.	≤4% isi/tema PkM dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra LN.	Risiko: Target ≤ 4% sulit dicapai karena tidak ada proyek yang melibatkan mitra LN. Akar Permasalahan: - Minimnya jejaring (networking) dan kolaborasi internasional dosen - Kemampuan bahasa Inggris dosen belum optimal.	Rasio joint research LN sangat rendah,	Mendorong dan memfasilitasi dosen mengikuti konferensi internasional, seminar, dan forum kolaborasi, Memperkuat MoU/MoA dengan perguruan tinggi luar negeri, Penyesuaian roadmap PkM agar selaras dengan tren riset global.	LPPM, Warek 2, LPM, LPBK, Dekan/Wadek 1, Kaprodi, Dosen pelaksana	MoU/MoA dengan institusi LN, Roadmap PkM, Proposal hibah eksternal, Laporan monitoring MoU/MoA



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			- Topik PkM kurang relevan atau tidak sesuai prioritas riset mitra luar negeri - Keterbatasan pendanaan untuk kegiatan kolaborasi internasional - Rendahnya motivasi dosen untuk melakukan joint research LN				



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
5	Persentase kepuasan stakeholder (Dosen dan Mitra PkM) terhadap sarana dan prasarana	Kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana 85%.	Risiko: Tingkat kepuasan stakeholder tidak mencapai 85% Akar Pemasalahan: - Sarana prasarana kurang memadai (laboratorium, ruang kelas, jaringan internet, fasilitas PkM) - Proses pengajuan perbaikan fasilitas lambat - Minimnya anggaran pemeliharaan sarpras - Kebutuhan dosen/mitra PkM tidak teridentifikasi dengan baik	- Penurunan minat kolaborasi PkM dan penelitian - Berkurangnya peluang hibah eksternal karena sarpras tidak mendukung	- Menyusun prioritas perbaikan sarpras berdasarkan tingkat urgensi - Menambah anggaran pemeliharaan (preventive maintenance) - Membuat SOP layanan sarpras yang cepat dan responsive - Memastikan survei kepuasan stakeholder menggunakan instrumen valid & reliabel	LPPM, Warek 2, LPM, Kabag Lab Dekan/Wadek 2, Kaprodi, Stakeholder	Laporan survey kepuasan stakeholder, kuesioner dan analisis kepuasan, SOP pemeliharaan sarpras, laporan kinerja unit sarpras
6	Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan,	Kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan 75%.	Risiko: Tingkat kepuasan stakeholder tidak mencapai 75% Akar Permasalahan: - Sarana prasarana kebersihan, keamanan, dan	Penurunan citra kampus dan kepercayaan stakeholder, Menurunnya produktivitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan,	- Membuat dan menjalankan SOP pelaksanaan dan evaluasi program lingkungan (hemat energi, sampah, daur ulang, transportasi)	LPPM, Warek 2, LPM, Kabag Lab Dekan/Wadek 2, Kaprodi, Stakeholder	Laporan survey kepuasan stakeholder, kuesioner dan analisis kepuasan, SOP pengelolaan, laporan kinerja unit sarpras, laporan AMI



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
	keamanan, dan kenyamanan.		kenyamanan belum optimal (toilet, ruang kelas, parkir, area hijau). - Pengelolaan program lingkungan (hemat energi, pengelolaan sampah, daur ulang) belum berjalan konsisten. - Sosialisasi program lingkungan pada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan masih kurang. - Sistem monitoring kebersihan, keamanan, dan kenyamanan tidak berjalan rutin. - Anggaran program lingkungan terbatas. - Keluhan stakeholder tidak ditindaklanjuti dengan cepat.	Menurunnya peluang akreditasi atau penilaian eksternal terkait green campus.	- Memperkuat unit pengelola sarana prasarana (cleaning service, keamanan, teknisi). - Menyediakan anggaran rutin untuk kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kampus. - Melakukan survei kepuasan stakeholder minimal 1–2 kali setahun dan menindaklanjuti hasilnya. - Menetapkan tim task force <i>Green Campus</i> untuk monitoring dan evaluasi bulanan. - Sosialisasi kampanye hemat energi, pemilahan sampah, kebersihan kelas, dan keselamatan		



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
					kampus melalui spanduk, media sosial, dan kegiatan kampus. - Peningkatan jumlah dan kualitas sarana kebersihan dan keamanan (CCTV, penerangan, APAR, tempat sampah terpilah, taman hijau). - Sistem pelaporan dan respon cepat terhadap keluhan stakeholder (melalui aplikasi/Google Form/Helpdesk).		
7	Adanya bukti pelaksanaan mekanisme pendanaan penelitian yang sesuai dengan pedoman dan atau SOP penggunaan dana penelitian	Tersedia dokumen lengkap	Risiko: - Mekanisme pendanaan penelitian tidak sesuai SOP atau pedoman, Ketidaksesuaian antara proposal, anggaran, dan realisasi penggunaan dana, Keterlambatan	- Potensi temuan audit internal/eksternal. - Penggunaan dana penelitian tidak optimal dan tidak akuntabel. - Penundaan penyelesaian penelitian karena keterlambatan dana.	- Melakukan sosialisasi rutin pedoman dan SOP kepada dosen/peneliti minimal setiap awal tahun akademik. - Mewajibkan peneliti mengunggah seluruh bukti	LPPM, Warek 2, LPM, ketua peneliti	SOP/pedoman pendanaan, bukti sosialisasi pedoman, proposal & RAB yang disetujui, laporan realisasi dan bukti pemakaian biaya, AMI



No	Indikator Kinerja Tambahan	Indikator & Target	Risiko & Akar Penyebab	Dampak	Mitigasi	Penanggung Jawab	Dokumen Bukti
			pencairan dana penelitian Akar Permasalahan: - Sosialisasi pedoman/SOP pendanaan penelitian masih kurang. - Rendahnya kepatuhan peneliti terhadap prosedur administrasi. - Sistem monitoring dan verifikasi internal belum optimal. - Beban kerja admin yang tinggi sehingga verifikasi kurang teliti. - Kurangnya integrasi sistem keuangan dengan sistem penelitian (SIMLIT).	- Risiko tidak tercapainya IKU pendanaan penelitian. - Menurunnya kepercayaan pihak eksternal terhadap tata kelola penelitian PT.	penggunaan dana ke SIMLIT/SIMPEG/ Sistem Keuangan PT. - Implementasi checklist verifikasi administrasi pendanaan oleh LPPM/Biro Keuangan. - Menerapkan audit internal berkala terhadap laporan penggunaan dana penelitian. - Penguatan digitalisasi sistem pendanaan penelitian (e-sign, unggah bukti, tracking). - Pelatihan kepada admin dan peneliti terkait tata kelola dana penelitian.		



f. Keterkaitan dengan ISO 21001:2018

1. Kausal 2: Acuan Normatif
2. Klausul 9: Evaluasi Performa

6. Pihak yang terlibat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Kepala LPPM
- d. Kepala LPBK
- e. Kepala LPM
- f. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
- g. Dekan Fakultas
- h. Wakil Dekan I dan II
- i. Ketua Program Studi
- j. Dosen

7. Dokumen yang terkait

- a. Renstra UMPP
- b. Renstra PkM UMPP
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat UMPP
- d. Rencana Pengembangan sarana dan prasarana
- e. Formulir Pendaftaran PkM
- f. Formulir surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian

8. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permentistekdikti No 50 Tahun 2018 Perubahan atas Pemenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- h. Pedoman SPMI 4.0 PTMA 2019, Majelis Diktilitbang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- i. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



- j. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- k. Kepmendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pendidikan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 tahun 2025
- m. Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Tinggi Tahun 2025





**Universitas Muhammadiyah
Pekajangan Pekalongan**